

Bersiasat Melawan Saudara Tua: Mobilisasi dan Resistensi Perempuan Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang

KEKE PAHLEVI DARADJATI

Mahasiswa Pascasarjana, Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Email: kekepahlevi@mail.ugm.ac.id

Abstract

The Japanese invasion of Indonesia in 1942 was driven by an urgent need for essential resources to support the Japanese effort to fight against the Allies. In its mobilisation plan, Japan placed women within the domestic sphere, providing daily informal services to support Japanese colonial policies. By analysing the Japanese propaganda materials and official documents chronologically, this paper found that there is the manipulation of several aspects of a gender policy for women, which were increasingly influenced by war conditions. Japan demands adherence to specific constructions about how women should act as citizens. In this regard, Indonesian women who chose collaboration and non-collaboration paths were adept at rearranging strategies so that the struggle continued as much as possible. To some extent, women could take advantage of the mass mobilisation facilities and roles that Japan had allocated to foster socio-economic improvements and efforts towards Indonesia's political independence.

Keywords:
colonialism;
Japan; war;
women

Abstrak

Penaklukan Jepang atas Indonesia pada tahun 1942 didorong oleh kebutuhan mendesak atas sumber-sumber penting yang mampu mendukung usaha Jepang bertempur melawan pihak sekutu. Dalam rancangan mobilisasi total, perempuan adalah makhluk domestik penjaga garis belakang perang. Mereka diberi tanggung jawab menyediakan pelayanan informal keseharian untuk mendukung kebijakan penjajahan. Dengan pembacaan secara kronologis terhadap bahan-bahan propaganda pers serta dokumen pemerintah, tulisan ini menemukan bahwa terdapat manipulasi terhadap beberapa aspek kebijakan gender bagi perempuan yang semakin dipengaruhi oleh kondisi peperangan. Jepang menuntut kepatuhan mutlak terhadap konstruksi pasti mengenai bagaimana seharusnya perempuan bertindak sebagai warga negaranya. Mengenai hal ini, perempuan Indonesia, baik yang memilih jalur kolaborasi maupun non-kolaborasi, ternyata cukup lihai mengatur ulang strategi agar perjuangan sebisa mungkin tetap dilanjutkan. Hingga taraf tertentu, perempuan mampu memanfaatkan fasilitas mobilisasi massa serta peran yang telah dijatahkan Jepang untuk membina perbaikan sosial-ekonomi dan upaya ke arah kemerdekaan politik Indonesia.

Kata Kunci:
Jepang;
penjajahan;
perang;
perempuan

Pendahuluan

Aktivitas fasis Jepang dalam memperebutkan sumber ekonomi dunia telah membawanya menjadi salah satu peserta dalam Perang Dunia II. Penjajahan atas Indonesia¹ pada tahun 1942 adalah dalam rangka mendukung upaya perang tersebut. Bagi Jepang, mengakuisisi Indonesia dari tangan Belanda berarti mempermudah jalannya untuk pengadaan sumber daya bagi industri perang yang sedang dijalaninya (Aziz, 1955; Sato, 2015; Gotto, 1998). Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di masa penjajahan Jepang “segalanya adalah demi dan untuk perang”, sehingga segala kebijakan yang dikeluarkan selalu berpangkal dari maksud militeristis tersebut (Lapian & Chaniago, 1989: 4).²

Dalam hal ini, perang menjadi suatu kata kunci yang menjadikan Jepang memerintah secara totaliter. Hal yang mereka pertaruhkan dalam perang ini sangat besar. Itulah mengapa mereka memeras semua yang bisa diperas, baik sumber material maupun tenaga manusia. Di mata Jepang, tidak ada perbuatan yang melampaui batas asalkan mereka keluar sebagai pemenang perang (Sihombing, 1962:4). Pendeknya, semua adalah demi melayani kepentingan penguasa. Selama suatu hal tersebut memiliki daya potensi yang baik untuk tujuan peperangan, Jepang akan mengerahkannya.

Kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan seiring dengan pergantian rezim penguasa. Dalam konteks perjuangan kebangsaan, gerakan politik mandiri di masa Jepang berkuasa sama sekali tidak diberi ruang hidup. Oleh karena kecenderungan sikap hidup otoriter yang dimiliki Jepang (Ebenstein, 2006: 103). melawan secara terang-terangan berarti juga kehancuran. Kesadaran politik untuk mencapai persamaan hak dan semangat anti-kolonialisme pernah dipegang bersama oleh para aktor perempuan Indonesia pra-kemerdekaan, di mana Kongres pada 22 Desember 1928 merupakan usaha pertama dalam rangka mempersatukan gerakan (Blackburn: 2007). Keberhasilan melaksanakan hingga empat kali kongres merupakan pertanda bahwa gerakan perempuan telah maju pesat. Suara mereka semakin nyaring melakukan tuntutan. Namun, proses ini segera terhenti oleh pergantian kekuasaan dari kolonial Belanda kepada Jepang. Gerakan perempuan pada masa Jepang benar-benar di-dominasi oleh pemerintah militer. Penundukkan dilakukan dengan melibas segala organisasi perempuan yang bersifat mandiri dan sebagai gantinya mereka dipaksa untuk meleburkan diri dalam beragam program dan organisasi massa yang mendukung upaya

1) Penulis akan beberapa kali menggunakan istilah “Indonesia” dan “Hindia Belanda” secara bergantian untuk memudahkan pemahaman tanpa bermaksud menjadi anakronis.

2) Secara garis besar, pemerintahan militer Jepang memiliki tiga prinsip utama dalam menjalankan pemerintahannya. 1) mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat dalam memenangkan perang, 2) memanfaatkan struktur pemerintahan yang sudah ada, 3) mengupayakan agar daerah pendudukannya dapat memenuhi kebutuhan sendiri untuk dijadikan pusat persediaan makanan.

perang (Blackburn, 2004: 20).

Tujuan mobilisasi untuk kepentingan perang tadi tidak banyak berhasil tanpa dukungan orang-orang yang patuh dan menerima. Dalam hal ini, Jepang membutuhkan loyalitas dari masyarakat jajahan. Memang bukan suatu pekerjaan mudah untuk menciptakan iklim kolaborasi dengan seluruh rakyat di sebuah wilayah yang sebelumnya masih terasa asing bagi mereka (Goodman, 1991: 2-4). Pemerintah militer segera menyadari bahwa mereka menghadapi persoalan politik terkait bagaimana cara mengubah struktur masyarakat Indonesia menjadi sesuai dengan kepentingannya. Mengenai hal itu, japanisasi merupakan satu cara yang paling giat dilakukan Jepang dan terbukti khasiatnya di wilayah yang jauh lebih dulu mereka kuasai (Sihombing, 1962: 5). Jepang mengembangkan program pendidikan dan indoktrinasi dengan menempatkan superioritas budaya Jepang atas wilayah dudukan dengan harapan mereka akan mampu menjangkau masyarakat Indonesia yang sangat luas dan beragam (Goodman, 1991).

Selama bagian awal penjajahan, perempuan adalah agen esensial untuk menarik loyalitas penduduk Indonesia yang dianggap dapat menyalurkan nilai-nilai baru melalui keluarga. Mereka harus tetap berada di ranah domestik dan berfungsi dengan baik di sini (*Pandji Poestaka*, 15 Februari 1944). Menyentuh institusi keluarga melalui perempuan adalah sebuah langkah penting untuk membawa rakyat Indonesia kepada sebuah mentalitas baru yang selaras dengan era persatuan dan kerja sama dalam lingkungan persemakmuran Asia Timur Raya di bawah supremasi Jepang (*Hakko Ichiu*) (Goto, 1998: xvi-xvii).³ Namun, yang menarik adalah ketika situasi perang semakin tidak menguntungkan bagi Jepang, terutama ketika kelimpahan tenaga benar-benar sedang diminta dari penduduk Indonesia. Mereka segera menggeser kebijakan gendernya terhadap perempuan. Semakin lama, Jepang semakin dipaksa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek sebagai akibat dari komplikasi kebijakan ekonomi dan pertahanan. Pada saat ini, keberadaan perempuan terlihat jauh lebih penting lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika kondisi peperangan Jepang telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, mereka mulai mengatur ulang pandangan masyarakat mengenai kontribusi perempuan dalam peperangan.⁴

Propaganda dan indoktrinasi Jepang bagi perempuan memberi perhatian pada standarisasi peran dan sifat-sifat keperempuanan ideal

3) Penciptaan mitos *Hakko Ichiu* atau slogan persaudaraan universal Jepang dalam Perang dunia kedua ini terus-menerus disuarakan dalam media-media propaganda Jepang. *Hakko Ichiu* sebagai teori hubungan internasional buatan Jepang bersifat hierarkis dimana Jepang menempatkan seluruh bangsa-bangsa Asia di bawah satu atap dengan Jepang di puncak kepemimpinan sebagai "ayah/" yang akan menciptakan keluarga Asia" dan menjadi cikal-bakal gerakan pan-Asianisme Jepang.

4) Pembacaan secara kronologis bahan-bahan propaganda dan dokumen pemerintah menunjukkan gejala ini.

yang mengikuti logika perang. Produk kesenian, karya sastra, pers, siaran radio, sampai pendidikan dijadikan motor dari usaha perubahan agar sebuah pendefinisian peran perempuan yang sesuai dengan kepentingan Jepang dapat menyebar dan diterima sebagai norma baru oleh masyarakat luas. Hal ini terasa sangat jelas terutama karena, di setiap alat propaganda, Jepang selalu terlihat bersungguh-sungguh mengulas dan meromantisasi peran tertentu dari perempuan.

Mesin propaganda tersebut didukung juga dengan organisasi resmi. Sedari awal pemerintah Jepang membentuk bagian keputrian pada setiap program atau organisasi masa buaatannya. Fujinkai, yang dibentuk pada tahun 1943, merupakan yang terpenting oleh karena fungsinya dalam memobilisasikan tenaga perempuan pada semua lapisan masyarakat khususnya Jawa dan Madura. Demi menjangkau masyarakat secara luas, kepemimpinan puncak pada Fujinkai diberikan kepada perempuan berpengaruh seperti istri-istri pejabat pemerintah atau cendekiawan perempuan yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam gerakan kebangsaan di masa sebelumnya (Fatimah, in: Horton & Kwartanda [peny.], 2009: 290).

Oleh karena sifat pemerintahan Jepang yang *represif*, pilihannya saat ini bukan lagi antara kooperasi dan non kooperasi, melainkan kolaborasi atau non kolaborasi.⁵ Sedangkan untuk menolak kolaborasi dibutuhkan keteguhan mental yang luar biasa. Metode perlawanan harus dilakukan sehalus mungkin oleh karena bukan sekedar penjara, melainkan penyiksaan atau kematian yang harus dihadapi oleh para penentang. Sama seperti Jepang yang memakai agen politik Indonesia untuk mendapat pengaruh rakyat, pihak Indonesia juga terbukti dengan baik memanfaatkan peluang yang ada untuk meneruskan perjuangan (Kahin, 1995: 131-136; Wertheim, 1999:57; Benda, 1985: 138; Notosusanto, dkk, 1975:11).

Sungguh menarik bahwa sebenarnya perempuan tidak bersifat pasif dalam sistem yang dibangun oleh Jepang. Sementara beberapa perempuan menentang keras Jepang, yang lain coba bermain dalam tatanan sosial baru yang dipromosikan oleh pemerintah militer. Hampir semua peneliti mengatakan bahwa, selama periode Jepang, pergerakan perempuan terhenti oleh karena tidak ada lembaga atau organisasi yang dapat memperjuangkan emansipasi padahal gerakan perempuan itu berjalan terus meskipun tanpa lembaga. Ketika ada kesempatan para tokoh perempuan untuk saling bertemu, mereka menyebarkan *public opinion* bahwa kaum perempuan harus tetap

5) Ini merupakan taktik perjuangan dalam menghadapi dua watak pemerintah kolonial yang sangat berlainan. Jika di masa kekuasaan Belanda pihak Indonesia masih diberi peluang untuk mengajukan tuntutan, misalnya dengan bersikap moderat (kooperatif) dengan pemerintah, di masa Jepang tidak ada celah kebebasan sama sekali. Perjuangan di bawah dominasi Jepang harus dilakukan dengan cara paling halus seperti halnya memperlihatkan diri sebagai kolaborator yang mau bekerjasama menurut kehendak Jepang.

melakukan perjuangan sambil menyesuaikan diri dengan keadaan zaman (Suryochondro, 1984: 114).

“Pemakaian” perempuan sebagai instrumen strategis untuk kepentingan rezim penguasa terlihat menjadi suatu pola yang berulang dalam sejarah politik Indonesia. Otak-atik, manipulasi, atau pemanfaatan peran perempuan yang telah dikonstruksi oleh lingkungan budaya terlihat jelas dilakukan oleh penguasa di masa-masa krisis seperti perang. Dalam konteks ini, bagaimana perempuan dihadirkan dalam suatu proses sosial akan selalu berubah dari waktu ke waktu bergantung pada sifat rezim dalam memandang apa yang diyakini pantas dilakukan perempuan dalam masyarakatnya.

Mobilisasi Total bagi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Perang

Kebutuhan terhadap penguasaan sumber-sumber vital Indonesia dan penjagaan ketahanan perang telah memunculkan kerusakan parah pada kondisi ekonomi, khususnya dalam hal ini Jawa sebagai pusat aktivitas pendudukan. Kesulitan ekonomi yang sebenarnya sudah muncul di akhir kolonial Belanda terutama akibat dari perubahan struktur ekonomi global dilanjutkan dan memburuk ketika Jepang memerintah (Sato, 2006).

Wilayah-wilayah yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya direncanakan sebagai wilayah yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri (Notosusanto, dkk, 1975: 141). Di Jawa, program ekonomi Jepang tampak mendapatkan prioritas, sementara program politik menjadi sarana penunjang untuk mewujudkan kepentingan ekonomi tersebut. Untuk itu, aktivitas-aktivitas dalam organisasi masa, seperti *Djawa Hokokai* maupun badan lain yang tergabung didalamnya, diarahkan untuk memaksimalkan distribusi tenaga rakyat demi mendapat keuntungan material secara langsung untuk pemerintah (Kurasawa, 1993: 373).

Ekonomi perang Jepang yang berciri kontrol dan pengawasan ketat atas faktor produksi menjadikan penduduk tidak memiliki kebebasan untuk menanam tanaman secara sembarangan sesuai kebutuhan mereka. Beberapa jenis tanaman mendapat perhatian besar dari pemerintah, sementara yang lain dikurangi bahkan diganti dengan tanaman lain. Hal ini karena tidak semua tanaman dianggap penting bagi kebutuhan perang. Kina, karet, dan bahan tambang diproduksi dalam jumlah besar, sedangkan tanaman seperti teh dan kopi diganti dengan tanaman bahan makanan yang sedang mengkhawatirkan (*Kan Po*, 10 Oktober 1944).

Pada masa Jepang berkuasa, kekurangan komoditas memang terjadi dalam tingkat yang akut (Sato, in: Kratoska [peny.]. 1998: 168). Pertama-tama dalam hal sandang. Pemandangan orang memakai baju compang-camping, karung goni (bagor), hingga lembaran karet mentah menjadi hal yang lumrah. Di pertengahan tahun 1943, semua pakaian sulit ditemukan dalam pasar

terbuka, sedangkan harga pakaian di pasar gelap melonjak di luar jangkauan orang miskin (Sato, in: Horton & Kwartanda [peny.], 2011: 268). Kekurangan sandang sebenarnya sudah muncul setelah tahun 1939, tetapi menjadi sangat akut selama masa penjajahan Jepang. Sebenarnya, hal ini tidak akan terjadi jika Jepang, sebagai pemasok terbesar tekstil, mampu terus melakukan ekspor untuk Indonesia. Sayangnya, Jepang sendiri juga mengalami masalah serius. Industri tekstil Jepang yang bergantung pada bahan impor, terutama kapas dan wol, terganggu pascapecahnya perang Tiongkok-Jepang (1937). Jepang yang sedang mengalami masalah pada industri tekstilnya terpaksa mencari kebutuhan kapas melalui daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya (Sato, 2006: 234-235). Hal inilah yang nantinya menjadikan intensifikasi penanaman kapas terus didorong dan disuarakan dalam media-media propaganda serta program pendidikan Jepang.

Proyek skala besar Jepang untuk menanam beberapa tanaman yang tidak dapat dimakan, seperti halnya kapas di atas, begitu juga rami, rosela, maupun jarak, telah merusak produksi pangan di Jawa. Kelaparan parah banyak terjadi di mana-mana. Masyarakat terpaksa makan seadanya sehingga gizi buruk dan kematian merajalela. Hal ini ditambah dengan problem serius terkait impor beras yang tengah dialami Jepang akibat pecahnya perang (Kratoska, 1998: 271).

Untuk mengurangi dampak buruk penjajahan, Jepang melakukan propaganda intensif untuk meningkatkan produksi beras sejak akhir tahun 1943. Pemerintah Jepang mewarisi reformasi yang telah dimulai Belanda dalam hal produksi dan distribusi makanan, yakni dengan memilih Jawa sebagai pemasok utama beras ke daerah-daerah defisit (Sato, 2006: 240-241) Meskipun Jawa di masa Belanda menjadi daerah yang mampu menopang dirinya sendiri, dalam hal makanan pokok, bukan berarti keadaan ini dapat berlangsung di bawah rezim militer Jepang. Kewajiban produksi makanan yang dibebankan kepada Jawa tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya untuk bertahan hidup secara mandiri, tetapi juga memenuhi bahan-bahan perang yang semakin lama semakin bertambah (Sato, 2006: 245)

Tahun 1944 merupakan tahun krisis yang sering disebut sebagai tahun paceklik. Pengharapan besar yang diberikan Jepang atas produksi beras dari Jawa tidak berbuah manis. Kebutuhan terhadap bahan baku terus meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan produksinya. Kekeringan parah, posisi Jepang di Front Pasifik yang semakin melemah, serta ketidakbijaksanaan Jepang dalam menerapkan kebijakan menjadi suatu lingkaran setan. Tuntutan keadaan dalam memenuhi kebutuhan dengan tenaga sendiri secara kilat menjadi alasan Jepang mengerahkan tenaga kerja yang lebih besar lagi baik untuk kepentingan pertahanan maupun menambah hasil bumi (Soeara Asia, 17 April 1944). Jawa menjadi pulau yang diberi tugas sangat berat. Selain kesuburan tanahnya yang dijadikan lahan untuk peningkatan produksi hasil

bumi, kelebihan penduduk pun dijadikan sasaran “mobilisasi total” penghasil tenaga kerja.

Keputusan Jepang untuk memobilisasi lebih banyak pekerja secara intensif dan sistematis membawa beberapa konsekuensi yang kontradiktif. Pertama, Jepang membutuhkan beras dalam jumlah yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan makanan tenaga buruh yang dimobilisasi. Kedua, penarikan banyak tenaga kerja dari sektor pertanian secara ironis menjadikan swasembada ekonomi lebih sulit tercapai. Ketiga, kebijakan yang mulanya dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan, justru membebani rakyat dan malah menciptakan masalah sosial-ekonomi yang makin meluas.

Tenaga Perempuan dalam Perang Asia Timur Raya

Apa yang terjadi secara ekonomi tadi memaksa Jepang untuk selalu menyesuaikan kebijakan politiknya. Sejak awal kedatangan, pemerintah militer sebenarnya telah mencari dukungan perempuan dalam menyelesaikan misi penjajahan. Ini terbukti dari keberadaan seksi perempuan sedari awal pembentukan gerakan atau organisasi massa. Meskipun demikian, keberadaannya masih terlihat sekunder.

Di masa awal, keberadaan perempuan terbatas pada aktivitas mendukung program politik Jepang dalam mencari dukungan penduduk lokal. Melalui Barisan Istri 3A di bawah pimpinan Ny. Artinah Samsudin (*Gunseikanbu*, 1944: 477)., Jepang meminta perempuan untuk mendukung para lelaki menyongsong pembentukan masyarakat baru di bawah kepemimpinan Jepang yang rela berkorban demi kemajuan Asia Timur Raya (*Asia Raya*, 12 Mei 1942). Namun, gerakan 3A ini tidak berumur lama karena gagal menarik simpati penduduk Indonesia.

Memasuki tahun 1943, situasi perang mulai berbalik merugikan Jepang. Pihak berwenang di Tokyo merespon dengan memerintahkan pembangunan pertahanan secara besar-besaran di seluruh teater perang serta mendorong peningkatan secara radikal mobilisasi tenaga kerja (Kratoska, 1998: 270). Organisasi Putera sebagai pengganti gerakan 3A di Jawa dirancang untuk mendukung usaha-usaha tersebut. Ketika hampir semua lelaki berusia produktif terkena kewajiban bekerja untuk sektor pertahanan dan pelayanan nonpertanian yang disponsori Putera, kaum perempuan melalui Barisan Pekerja Perempuan Putera diminta memusatkan seluruh tenaganya memperkuat garis belakang. Mereka terutama diharapkan mampu memberi pimpinan masyarakat dalam menyesuaikan keadaan di segala lapangan dengan penghidupan masa perang (*Pembangoen*, 17 Maret 1943).

Semenjak ekonomi Indonesia berubah menjadi ekonomi perang, produksi bahan-bahan kesejahteraan masyarakat (sandang-pangan) selalu tidak pernah memadai. Kesejahteraan masyarakat menurun secara drastis dan kondisi menjadi semakin kritis, sementara persoalan tenaga kerja untuk

menyelesaikan problem perang menjadi masalah serius yang menuntut penyelesaian secepatnya. Kemudian atas usulan anggota dalam sidang *Chuo Sangi-in* yang ke-4 pada 15 Agustus 1944, keberadaan perempuan sangat diharapkan menjadi substitusi tenaga laki-laki yang hilang (*Kan Po*, 25 Agustus 1944). Pertimbangan untuk memanfaatkan tenaga perempuan adalah anggapan bahwa masih sedikit perempuan di Jawa yang bekerja dalam lapangan produksi, dengan pertanian sebagai pengecualian. Untuk masa ini, perempuan diminta untuk mempertimbangkan kembali pekerjaan yang cocok bagi mereka, meskipun pekerjaan itu dulunya dilakukan oleh laki-laki (*Kan Po*, 25 Agustus 1944).

Dalam rangka menuju swasembada ekonomi di masing-masing wilayah pendudukan, pemerintah membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk proyek sipil, seperti mengolah bahan mentah yang sebelumnya di ekspor, memproduksi barang substitusi impor, maupun barang kebutuhan militer, perempuan lantas dipanggil untuk bekerja di pabrik-pabrik yang sedang berusaha melipatgandakan produksi bahan-bahan strategis untuk keperluan perang dan keperluan hidup (*Djawa Baroe*, 1 Februari 1943).

Ketidaksesuaian hasil yang didapat dari Putera menjadikan Jepang langsung membentuk organisasi lain yang dapat menjamin pihak Indonesia bekerja sesuai dengan garis kebijakannya. Organisasi yang dimaksud dibentuk pada 1 April 1944 dan diberi nama *Djawa Hokokai* 'Perhimpunan Kebaktian Rakyat Djawa'. Badan baru ini diciptakan Jepang untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya ekonomi dan manusia ketika memasuki musim paceklik tahun 1944. *Djawa Hokokai* memiliki jangkauan yang lebih luas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan menempatkan cabangnya meresap hingga ke desa-desa (*Kan Po*, 10 Maret 1944).

Perempuan, dalam hal ini melalui Fujinkai, memiliki peran strategis untuk menunjang kepentingan Jepang di bawah payung *Djawa Hokokai*. Fujinkai biasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti memelihara anak, menerapkan gaya hidup sehat untuk keluarga, kepalangmerahan, gaya hidup hemat dengan menabung uang, melaksanakan tugas pendidikan dalam rumah tangga, pemberantasan buta huruf, dan termasuk juga menyelidiki pengganti makanan yang tengah langka (*Kan Po*, 25 Februari 1944).

Selain persoalan kelangkaan bahan makanan di atas, tenaga perempuan juga dimobilisasi untuk mengatasi krisis sandang. Perluasan produksi kapas yang juga merusak produksi pangan serta keputusan atas penurunan hasilnya mengantarkan otoritas Jepang mendistribusikan biji kapas ke setiap rumah tangga untuk dibudidayakan di kebun rumah mereka sendiri (Sato, in Horton & Kwartanda [peny.], 2009: 270-271). Mengenai hal ini, anggota Fujinkai diberi kewajiban pergi ke kampung atau desa untuk menerangkan anjuran penanaman kapas oleh kaum perempuan (Rambe, 1983: 51).

Akhirnya, masalah sosial-ekonomi sebagai komplikasi tak terduga

akibat praktik politik penjajahan Jepang di Indonesia telah menjadi dasar situasi yang meningkatkan signifikansi tenaga perempuan. Perempuan dengan sifat-sifat kewanitaan tertentu diarahkan untuk melakukan aktivitas keseharian demi meningkatkan hasil produksi bahan pokok penunjang kehidupan dan mengurangi dampak buruk penjajahan.

Propaganda Perempuan “Ideal” di Bawah Kuasa Jepang

Urgensi atas pemanfaatan tenaga perempuan secara mencolok mendorong penguasa Jepang untuk melakukan penyesuaian, otak-atik, dan akhirnya perumusan peran perempuan Indonesia agar sesuai dengan kepentingannya. Di bulan Agustus 1942, Jepang membentuk *Sendenbu*, sebuah departemen independen di dalam badan pemerintahan militer (*Gunseikanbu*) yang secara khusus menyusun bahan dan rancangan propaganda bagi masyarakat sipil (Kurasawa, 1993: 229-230). Melalui badan inilah pemerintah Jepang melakukan konstruksi peran bagi tiap-tiap anggota masyarakat dengan menyalurkan doktrinnya melalui pendidikan dan kebudayaan.

Ketika Jepang mulai berkuasa, “perempuan ideal adalah yang menjadi ibu rumah tangga” ditetapkan menjadi norma yang disepakati berlaku. Dalam suatu sidang majelis rendah di Tokyo, Perdana Menteri Tojo menganjurkan bahwa kewajiban utama perempuan adalah tetap berada di rumah dan menjaga keselamatan rumah tangganya (*Asia Raya*, 20 November 1943). Kedudukan ini dikatakan sebagai hal yang paling tepat bagi perempuan dan sesuai dengan norma-norma ketimuran. Permintaan agar para perempuan fokus memperkuat rumah tangga merupakan pembagian peran yang logis dari penguasa tatkala mereka membutuhkan penduduk laki-lakinya untuk menjadi angkatan kerja atau mengisi tenaga tempur.

Jepang ingin agar perempuan Indonesia bisa seperti perempuan Jepang yang tinggal bersama dengan urusan-urusan domestik serta sangat taat kepada suami dan negaranya. Gambaran sosok perempuan ibu rumah tangga yang tangguh, bermental kuat, tetapi memiliki kehalusan jiwa muncul manakala keadaan berubah dengan sangat cepat ke kesulitan hidup sebagai imbas dari terbawanya Indonesia dalam kancah peperangan (*Djawa Baroe*, 15 April 1943).

Dengan melakukan konstruksi peran ibu, pemerintah akan secara otomatis menyentuh keberadaan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Selain mendukung pembentukan masyarakat, keadaan keluarga akan berpengaruh terhadap eksistensi rezim Jepang melalui beberapa alasan. *Pertama*, sebagai salah satu sarana vital penyosialisasian norma penguasa melalui pendidikan anak-anak (*Asia Raya*, 17 Mei 1942). *Kedua*, sebagai tempat untuk menghasilkan tenaga kerja sekaligus pengisi amunisi yang akan menjaga pasokan tenaga kerja tetap aman. Kebutuhan terhadap cadangan tenaga kerja dan prajurit yang berkualitas tinggi, dicari Jepang melalui perempuan sebagai konsekuensi logis dari kepemilikan rahim. Selain itu, perempuan adalah

orang yang dimintai pertanggung-jawaban untuk menjamin keturunannya kuat, sehat jasmani dan rohani, hingga akhirnya bermanfaat bagi tanah air (*Djawa Baroe*, 15 Februari 1943). Perempuan rupanya juga diposisikan sebagai pengendali laki-laki yang diperlukan untuk menjadi angkatan bersenjata. Propaganda diarahkan untuk membujuk mereka bersedia mengorbankan orang-orang tercinta untuk maju ke medan laga membela kepentingan penguasa. Perempuan yang menjadi ibu serta istri tentara merupakan idaman.

Perempuan dicitrakan sebagai suatu entitas dengan kekuatan hidup yang baik dalam menghadapi situasi krisis. Mereka diharapkan tidak hanya bertahan dengan dirinya sendiri, tetapi juga berdampak bagi keadaan sekitarnya. Di tengah krisis tenaga laki-laki, ia adalah sosok, yang dengan cara apa pun, melindungi keselamatan rumah tangga. Sebagai ibu, mereka adalah penjaga keteraturan dan kesehatan anggota keluarga, memastikan kebersihan lingkungan, mengatur uang belanja rumah tangga, hingga memikirkan urusan menu sehari-hari (*Sinar Matahari*, 22 Oktober 1942). Kelangkaan pangan hingga gizi buruk disiasati Jepang dengan mendorong perempuan menjadi kreatif menanggung asupan pangan murah, bahan sederhana, tetapi tetap berguna bagi kesehatan anggota keluarganya (*Sinar Baroe*, 1 Januari 1944).

Oleh Jepang, perempuan dijadikan figur yang mampu membantunya mengatasi persoalan pangan dan sandang. Menurut pandangan rezim, ketika semakin banyak perempuan yang berani menyingsingkan lengan baju untuk melangkah ke arah pertanian, kedudukan masyarakat akan semakin teguh dan makanan akan tumpah ruah. Perempuan perkotaan terpelajar dan putri-putri ningrat dimohon untuk membiasakan diri turun ke sawah-sawah, yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya, tetapi biasa dilakukan sesama kaumnya di pedesaan (*Pandji Poestaka*, 16 Juni 1944). Meskipun seruan-seruan ini umumnya mendorong perempuan untuk berjerih payah memberi makan suami beserta anak-anaknya melalui lapangan rumah tangga masing-masing, ini sebenarnya juga berarti meminta perempuan berjuang melawan kelaparan yang sedang meluas (*Asia Raya*, 16 Februari 1944).

Hingga 1943, perempuan tidak diakui sebagai makhluk publik dan belum diminta untuk bekerja di luar lingkup institusi keluarga. Namun, Jepang mulai menggeser kebijakan gendernya di tahun 1944. Ketika itu, posisi Jepang sudah sangat terjepit dan benar-benar membutuhkan kelimpahan tenaga dari penduduk Indonesia agar mesin perangnya tetap berjalan. Kebutuhan tenaga manusia ini terutama dalam dua lapangan, yakni pembelaan tanah air dan menambah hasil produksi (*Asia Raya*, 16 Februari 1944).

Selama masa krisis tenaga kerja inilah propaganda Jepang memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat sipil supaya mau bergabung dengan angkatan kerja. Perempuan menjadi sasaran propaganda massif karena mereka dianggap sebagai harta karun tenaga yang mampu menjadi substitusi tenaga laki-laki. Secara terang-terangan, Jepang mulai meminta perempuan

untuk masuk ke dalam angkatan kerja.

Tenaga kerja perempuan terkhusus dibutuhkan untuk membereskan permasalahan ekonomi atau keperluan hidup. Seruan-seruan agar perempuan keluar dari rumah masing-masing untuk bekerja mulai bertebaran. Perempuan diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang patut atau mungkin dikerjakan oleh perempuan. Jika pekerjaan tersebut dirasa masih sesuai dengan sifat istimewa jasmani dan rohaninya, sebaiknya perempuan melakukannya meskipun pekerjaan tersebut dulunya dilakukan oleh laki-laki (*Kan Po*, 25 Agustus 1944). Pemerintah Jepang melalui saluran indoktrinasi maupun Fujinkai sebagai organisasi kewanitaan tunggal menganjur-anjurkan perempuan untuk bekerja. Seorang pejabat Jepang dalam sebuah peringatan satu tahun Semarang *Shu Fujinkai* memberikan nasihatnya:

“Kewajiban kaum wanita itu terutama di dalam lingkungan rumah tangga, akan tetapi karena dewasa ini adalah zaman peperangan, maka segenap tenaga kaum wanita juga harus dikerahkan guna menyokong mempercepat tercapainya kemenangan akhir” (*Sinar Baroe*, 12 Februari 1944).

Menurut pemerintah Jepang, pengerahan tenaga kerja perempuan ini harus memperhatikan tuntutan agama dan adat istiadat (*Kan Po*, 25 Agustus 1944). Mereka memilihkan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dianggap cocok dan masih sesuai dengan peran sosial perempuan yang telah mapan. Perempuan sendiri sangat dibutuhkan dalam hal peningkatan produksi keperluan hidup. Selain diandalkan berperan dalam pekerjaan pertanian seperti penanaman padi, kapas, atau jarak, perempuan juga dipanggil untuk mengisi lowongan pekerjaan di pabrik-pabrik (terutama tekstil) yang mulai diupayakan Jepang pascaisolasi ekonomi oleh sekutu.

Kerja sosial dan kemanusiaan menjadi jenis pekerjaan lain yang dilekatkan pada perempuan. Bekerja sebagai guru, juru rawat, atau kepalangmerahan yang membutuhkan sifat-sifat seperti lemah lembut, telaten, dan penuh cinta kasih, gencar dipromosikan oleh Jepang (*Sinar Baroe*, 5 Februari 1944).

Keadaan telah memaksa rezim menggeser ideologi gendernya dengan meminta perempuan mulai terjun ke lapangan pekerjaan dan kerja sosial, tetapi dengan catatan bahwa kewajiban rumah tangga tetap yang terpenting. Sebuah pernyataan lain dari PM Tojo terhadap para pekerja perempuan Jepang yang dimuat dalam majalah *Pandji Poestaka* sangat mencerminkan pergeseran ini (*Pandji Poestaka*, 15 Juni 1944).

“Sumbangan kaum wanita di berbagai-bagai lapang perindustrian niscaya lebih lagi memperteguh tenaga perang kita. Akan tetapi dalam pada itu, kaum wanita sekali-kali tidak boleh lupa bahwa kamu sekalian merupakan salah satu tiang bagi keteguhan rumah tangga dan harus dicamkan benar-benar bahwa kemenangan

dalam peperangan yang dilakukan dalam waktu yang lama bergantung banyak pada keteguhan garis belakang, bukan semata-mata pada medan pertempuran. Jangan sampai kaum wanita meninggalkan sifat kewanitaanya, sementara mereka bekerja di pabrik-pabrik untuk memperhebat produksi perang.”

Jika dibandingkan dengan pernyataan serupanya tentang kaum perempuan setahun sebelumnya yang dimuat dalam surat kabar Asia Raya dengan judul “Dimanakah Tempat Perempuan?” (*Asia Raya*, 20 November 1943), terlihat bahwa rezim sedang mengotak atik peran perempuan dan ini adalah cara untuk mempertahankan prinsip “perempuan sebagai makhluk rumah tangga”, tetapi masih tetap bisa dimanfaatkan tenaganya di lapangan lain yang sedang krisis tenaga.

Akhirnya, propaganda terus mencoba mengkomunikasikan kepada perempuan bahwa sambil mempertahankan peran domestiknya, mereka juga harus mengambil peran di luar rumah sebagai tugas patriotik. Pemerintah militer menampilkan diri seolah-olah selangkah lebih maju dengan mengakui dan mendorong bahwa perempuan berhak juga berperan di luar keluarga. Padahal ini sama artinya dengan mengeksploitasi tenaga perempuan supaya roda kekuasaan Jepang tetap berjalan.

Resistensi Perempuan Indonesia terhadap Kekuasaan Fasis Jepang

Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, Jepang tidak memberi nafas kebebasan sama sekali di negara-negara jajahannya. Sebagaimana yang tercermin dalam produk propaganda serta organisasi masa, aktivitas perempuan diarahkan untuk menyelesaikan kerusakan parah dalam kehidupan sosial-ekonomi, tetapi tanpa hak untuk mengajukan suatu persoalan yang sebenar-benarnya dibutuhkan perempuan itu sendiri.

Secara umum, ada dua sikap yang diambil oleh pemimpin perempuan Indonesia dalam menghadapi kekuasaan Jepang. Pertama adalah nonkolaborasi. Mereka yang berada di sisi ini memilih untuk tidak mau berurusan dengan program Jepang. Meskipun cenderung diam dan tidak mengambil aksi apa pun secara politik, rata-rata dari mereka masih bergerak di bidang sosial. Bahkan, ada juga yang secara diam-diam melakukan aksi bawah tanah meski jumlahnya sangat sedikit. Kedua adalah mereka yang mengambil jalan kolaborasi dengan Jepang. Dengan melihat watak pemerintahan Jepang, mereka memilih untuk bergerak melalui jalur legal dan menyambut uluran kerja sama yang ditawarkan Jepang. Setidaknya dari situ, mereka sedikit dapat berbuat untuk keperluan Indonesia.

Seorang tokoh Istri Sedar, Suzanna Hamdani mewakili pihak yang disebut pertama. Ia secara tegas menolak terlibat dengan tentara militer dan memilih tidak menonjolkan diri pada masa ini oleh karena tidak senang

dengan sikap Jepang yang totaliter. Meskipun tidak lagi aktif secara politik, bukan berarti mereka yang berada di pihak ini lantas mengasingkan diri dari pergolakan masyarakat. Terkhusus Ny. Suzanna sendiri, ia selalu mencari kesempatan untuk tetap berjejaring dengan kawan untuk mendiskusikan cita-cita mereka (Hamdani, in: Hardi [peny.], 1981: 211).

Sebagian dari mereka yang memilih jalan nonkolaborasi ini memilih masuk dalam pusaran pergerakan melalui cara lain. Satu contoh yang menarik diwakili oleh Johanna Masdani. Ia bersama dengan suaminya mendirikan sekolah untuk anak-anak remaja yang di dalamnya mereka belajar memintal dan menenun. Sekolah ini semacam bengkel kerja yang hasilnya bisa dijual kembali dan dapat menolong kehidupan mereka. Apa yang dilakukannya ini tidak lain adalah sebagai cara untuk meringankan beban penderitaan rakyat kecil (Masdani, in: Hardi [peny.], 1981: 123).

Banyak tokoh perempuan yang merasa prihatin dengan keadaan sekelilingnya, tetapi mereka tidak dapat leluasa bergerak untuk melakukan sesuatu seperti pada masa lalu. Pemerintahan yang sekarang sangat bengis. Penolakan secara kentara ditindak keras. Satu contoh adalah yang terjadi pada Siti Larang Sosrokardono. Ketika itu, ia sering menghadiri rapat dan pertemuan rahasia untuk mengatur siasat. *Kempeitai* yang mencium pergerakannya lantas menangkap dan menyiksanya di penjara Kalisosok dengan tuduhan “turut aktif dalam gerakan bawah tanah antifasis” (Sosrokardono, in: Hardi [peny.], 1981: 25).

Pengalaman serupa dialami oleh Suharti Sumodiwardjo atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Umi Sardjono, sebuah nama perjuangan yang didapatkannya dalam masa penjajahan Jepang. Di masa ini Umi dikirim ke Blitar dan dididik bergerilya melawan penguasa fasis yang perlakuannya sangat sewenang-wenang terhadap rakyat termasuk perempuan. Aktivismenya teruji saat ia bersama suaminya ditahan oleh Jepang dan harus berhadapan dengan *Kempeitai*. Betapa ia bertaruh banyak melawan kekuatan fasisme diungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut:

“Tak dapat diceritakan betapa ngerinya bengis dan kejinya Nippon. Orang hanya mengatakan inilah kebudayaan Dai Nippon *Homo Homini Lupus*, manusia serigala haus mangsa. Berhari-hari, berminggu-minggu pemeriksaan tanpa berhenti. Sekarang kami betul-betul merasakan betapa beratnya perjuangan melawan fasisme. Bukan perjuangan hanya sebagai petualang lagi. Dan ini rupanya yang dikatakan taruhan jiwa raga” (Lucas, 2012: 250).

Perbedaan pandangan dalam berjuang di antara tokoh perempuan merupakan hal yang lumrah. Mengingat perlakuan Jepang yang sering di luar perikemausiaan, menempuh jalan yang “ilegal” pada masa ini terasa sangat berisiko. Itulah mengapa bagi sebagian perempuan, kolaborasi dengan

penguasa yang menekan merupakan jalan yang paling baik dalam rangka mengambil kesempatan sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia. Hafni Zahra Abu Hanifah dan Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito (Issom, 2000: 46) menjadi perwakilan mereka yang berada pada posisi ini.

Para perempuan di pihak kolaborasi menganggap *Fujinkai* merupakan satu-satunya sarana paling efektif untuk mereka dapat bergerak. Berjuang di bawah tekanan Jepang memerlukan strategi dan kebijaksanaan yang sangat besar. Seperti diketahui, bahwa perang pasti membawa bencana. Di masa yang serba sulit ini, organisasi Jepang dapat menjadi wahana yang paling mungkin untuk dapat melakukan sesuatu hal yang berguna bagi rakyat terutama perempuan dan anak-anak (Penerangan, 1984: 97). Hafni Zahra Abu Hanifah mengutarakan pandangannya:

“Bukan untuk kesenangan aku turut masuk ke dalam Fujinkai. Kesempatan ini tak mau kulewatkan begitu saja. Kesempatan ini harus kumanfaatkan walaupun berat tebusannya. Aku insafi kemarahan teman-temanku, kalau tidak disebut aku sebagai pengkhianat terhadap pergerakan wanita Indonesia. Tetapi melihat anak-anak kita, putri-putri yang tubuhnya tinggal tulang belulang berjalan sepanjang jalan dengan kaleng-kaleng kosong. Melihat perlakuan terhadap putri-putri kita oleh serdadu Jepang aku harus mencari jalan keluar. Untuk merekalah setiap Sabtu dan Minggu dibuat bubur kacang hijau yang kami kumpulkan dari sana-sini yang oleh harian putri dibagi untuk mereka sepiring seorang. Ini tidak ada artinya tentu, tetapi lumayan daripada tidak ada sama sekali. Melalui Fujinkai aku kemukakan persoalan-persoalan putri-putri kita itu” (Hanifah, in: Hardi [peny.], 1981: 102).

Terkait pendapat bahwa Fujinkai merupakan organisasi perempuan yang terkontrol langsung oleh Jepang dengan kepemimpinan berjenjang oleh istri-istri kepala daerah, Sukaptinah memiliki pandangan lain yang menarik. Menurutnya, dengan adanya susunan yang seperti itu, malah justru hidup berorganisasi dapat dirasakan oleh seluruh wanita (Penerangan, 1984: 262). Hal tersebut praktis menjadikan para perempuan priyayi tidak mungkin lagi hidup di menara gading dengan menjaga jarak dengan rakyat kebanyakan seperti pada masa sebelumnya.

Bagi para perempuan yang telah terjun dalam pergerakan, Jepang sama saja penjajah seperti Belanda. Mereka tidak terbuai oleh propaganda pembebasan bangsa Asia yang memang langsung terbentur dengan kenyataan penjajahan. Para perempuan ini nyatanya cukup cerdas memainkan permainan Jepang untuk terus melanjutkan perjuangan. Djatmani Suparta merupakan perempuan lain yang menyambut uluran kerja sama Jepang. Baginya janji manis Jepang sebagai kompensasi agar bangsa Indonesia mau bekerja untuknya memang sangat meragukan. Tapi prinsip perjuangan harus digeser karena pembangkangan berarti hancur tanpa ampun. Ia mengungkapkan:

“Dalam keadaan terjepit, hanya ada satu alternatif, yaitu mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mempertinggi kesadaran dan kemampuan serta keterampilan masyarakat. Memang sengsara dan lebih rendah martabat bangsa Indonesia saat itu dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Tetapi dari sudut lain terbersit juga harapan dengan adanya kesempatan yang diberikan Jepang agar pada waktunya kita kuat dan mampu untuk merdeka. Kami selalu mendengungkan ungkapan *jer basuki mawa bea*, (untuk mendapatkan kebaikan dan kesenangan harus disertai usaha dan pengorbanan). Bukankah di Jakarta ada Bung Karno, Bung Hatta, dan pejuang-pejuang lainnya? Keyakinan ini mempertebal semangat dan kekuatan kami bahwa pengorbanan tidak akan sia-sia!” (Suparta, in: Hardi [peny.], 1981: 78-79).

Kepentingan perempuan di masa ini sebagian besar adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis yang harus langsung diatasi. Aktivitas-aktivitas perempuan Indonesia dalam Fujinkai paling banyak mencerminkan hal ini. Melalui organisasi Fujinkai, perempuan di zaman ini berikrar untuk meringankan penderitaan rakyat dengan memikirkan persoalan umum layaknya soal kesehatan masyarakat, krisis pangan dan sandang, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan perang, hingga persoalan pendidikan Masyarakat (*Asia Raya*, 3 Juni 1944).

Bagi perempuan, masa ini adalah masa berjuang melewati arus deras peperangan. Sukaptinah Soenaryo Mangunpuspito berbicara di depan permusyawaratan Fujinkai seluruh Jawa-Madura bahwa perempuan merupakan sayap kiri laki-laki dalam mengusahakan keperluan Masyarakat (*Asia Raya*, 29 Mei 1944). Menjalankan tugas di garis belakang diartikan perempuan bukan sekadar memperkuat pertahanan melalui penjaminan kecukupan suplai dan kesejahteraan prajurit seperti yang diharapkan Jepang. lebih penting lagi adalah sebagai pemberi daya hidup yang memperbaiki keadaan sosial-ekonomi Masyarakat (*Pembangoen*, 2 Desember 1943).

Di masa ini rumah tangga diartikan pula sebagai medan perang. Di situ merupakan pusat aktivitas pertahanan garis belakang dan perempuan sebagai istri dan terutama ibu yang diberi tugas memegang kemudinya. Jepang begitu meromantisasi peran-peran domestik perempuan sebagai sesuatu yang tinggi. Bagi Jepang, konstruksi ini merupakan upaya untuk meraup loyalitas perempuan agar dengan sukarela mengucurkan tenaganya. Namun bagi para pemimpin perempuan, konstruksi ibu masyarakat baru, atau ibu masyarakat yang sedang berperang membangun tata kehidupan Asia baru, justru dimanfaatkan untuk tetap memperjuangkan perbaikan kedudukan perempuan dalam masyarakat.

Meskipun propaganda semakin mempertegas batas-batas gender yang berlaku, perempuan justru menjadikan peran sosial itu sebagai sebuah kekuatan untuk menunjukkan eksistensinya. Sri Mangunsarkoro berbicara

dalam surat kabar terkait hal ini. Dia mengatakan bahwa di zaman pergantian seperti ini keadaan menjadi luar biasa. Perempuan dengan peran sebagai ibu yang dapat memberi pengaruh pada keadaan masyarakat melalui institusi keluarga, mengambil bagian sebagai pemberi daya hidup dan memperbaiki keadaan yang runyam (*Asia Raya*, 15 Januari 1944). Dalam sebuah tulisannya yang lain, ia juga menarasikan bahwa kewajiban-kewajiban yang mengikuti kodrat perempuan sebagai ibu adalah juga yang menunjukkan letak kebesarannya (*Asia Raya*, 1 April 1944). Dalam hal ini, ia jelas terlihat mencoba untuk memengaruhi pandangan umum bahwa apa yang diperbuat perempuan dalam ranah domestik bisa berarti signifikan bagi keperluan masyarakat yang lebih luas.

Pembagian peran secara gender oleh Jepang diterima serta dipakai perempuan untuk memperkuat daya tawarnya dalam masyarakat. Maria Ulfah, dalam satu tulisannya yang dimuat oleh *Djawa Baroe* tertanggal 1 April 1943 terlihat mengatur sebuah retorika pemenuhan kewajiban perang yang mengarah pada perbaikan kedudukan perempuan. Ia berupaya membangun kesepakatan bersama, baik dengan rezim maupun dengan masyarakatnya sendiri, bahwa penghargaan yang sama antara perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat yang harus dikabulkan agar perempuan dapat berperan dalam pembentukan Masyarakat baru. Dengan cukup terus terang ia menunjukkan maksudnya:

“Kita masih hidup dalam masa pancaroba. Kita harus bekerja untuk pembangunan masyarakat baru, dan dalam pekerjaan ini laki-laki dan perempuan sama kewajibannya. Tentu saja kita kaum wanita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk menyusun masyarakat baru, jikalau kepada kaum wanita dalam masyarakat baru itu diberikan kedudukan yang berharga, jika kepada gadis-gadis kita diberi penuh kesempatan untuk bersekolah, pendeknya, jika kaum wanita Indonesia dapat penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki dalam masyarakat yang sedang disusun itu. Menurut pendapat saya itulah syarat-syarat yang kita, kaum wanita harus kemukakan, supaya kita dapat menjalankan kewajiban kita, dengan sebaik-baiknya. Jika terbukti bahwa syarat-syarat itu tak diperhatikan, maka kita terpaksa memajukan lagi soal-soal kewanitaan itu, dan kita harus mendesak, supaya mendapat kedudukan yang berharga dalam Masyarakat (*Djawa Baroe*, 1 April 1943).“

Dalam suatu pernyataannya yang lain, Maria Ulfah berbicara bahwa kaum wanita akan selalu mengiringi jejak kaum laki-laki mengenai kepentingan bangsa. Pun di masa yang sekarang ini, perempuan sedang giat bekerja untuk memperkuat garis belakang. Termasuk rencana pemberantasan buta huruf, memperbaiki kesehatan masyarakat, membuka asrama bagi pelajar putri, dan lain sebagainya. Pendeknya, kaum perempuan juga mengambil bagian yang besar dalam gejolak masa peperangan ini. Ia meminta kepada

kaum laki-laki supaya mafhum akan tujuan perempuan dan menyokong penuh sepak terjangnya (*Asia Raya*, 19 Juni 1943). Bagi perempuan, peneguhan kedudukannya berarti pula perbaikan kehidupan masyarakat dan penyebaran cita-cita nasional. Perempuan dan laki-laki maju untuk satu tujuan, walaupun harus ada pembagian pekerjaan.

Sayup-sayup berita pelemahan Jepang di gelanggang perang meningkatkan rasa kepercayaan diri dari pihak Indonesia untuk segera merdeka. Permohonan Jepang agar perempuan semakin gigih memperkuat pertahanan belakang disambut dengan muka dua. Bekerja di bawah kerangka Jepang, berarti juga mendidik dan mempersiapkan perbekalan yang berguna bagi Indonesia merdeka dengan menggunakan biaya Jepang.

Di tengah kondisi yang bergejolak, Fujinkai mengadakan rapat umum di taman Raden Saleh, Jakarta. Dalam rapat tersebut, R.A Abdurrachman berbicara atas nama perempuan Indonesia bahwa mereka belum merasa puas sampai bisa ikut terlibat dan mengadakan rapat sendiri dalam menyambut perkenaan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Dengan melihat bukti nyata yang telah dilakukan perempuan mengatasi situasi pancaroba melalui usaha-usaha pertanian, pertenunan, pemberantasan buta huruf, dan lain sebagainya, maka kaum perempuan bertambah insaf bahwa mereka adalah anggota masyarakat yang berharga (*Asia Raya*, 17 September 1944). Perempuan Indonesia semakin mempertegas kedudukannya dalam setiap rapat besar, bahwa keberadaannya tidak mungkin dapat diabaikan dalam melaksanakan dan menyempurnakan maksud kemerdekaan (*Asia Raya*, 17 September 1944).

Sebuah hikmah yang tidak pernah disadari oleh Jepang adalah beragam sarana mobilisasi yang dibentuk Jepang untuk melanggengkan kekuasaan justru menjadi senjata makan tuan. Ketika situasi perang berbalik ke arah yang merugikan Jepang, perbekalan pihak Indonesia semakin matang dan tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk bergerak meraih merdeka.

Akhirnya, aktivitas-aktivitas perempuan baik di dalam ataupun di luar program Jepang, kesemuanya sebenarnya memiliki satu nafas yang sama, yakni keinginan untuk merdeka. Hingga taraf tertentu, para pemimpin politik perempuan mampu memanfaatkan fasilitas mobilisasi masa terutama organisasi Fujinkai untuk membina perbaikan sosial dan ekonomi juga sebagai langkah ke arah kemerdekaan politik Indonesia (Penerangan, 1984: 259).

Penutup

Perempuan selalu menjadi instrumen strategis untuk menjamin kelangsungan kekuasaan sebuah rezim. Di masa penjajahan Jepang, sikap tradisional mengenai tempat perempuan dalam masyarakat mendominasi kebijakan. Kepentingan mobilisasi masa dan haluan fasis berinteraksi dan menimbulkan pembagian kerja secara seksual yang pasti. Bagi Jepang, perempuan dapat

melayani negara dengan berfungsi baik di rumah, menjaga keselamatan rumah tangga selama lelakinya pergi berperang, dan menghasilkan warga negara yang berkualitas.

Namun, Jepang mulai menggeser kebijakan gendernya ketika situasi perang semakin tidak menguntungkan mereka. Kesulitan ekonomi dan ketiadaan tenaga laki-laki yang terasa semakin nyata memaksa Jepang untuk tidak lagi mempertahankan pembagian kerja yang lama. Sekarang perempuan adalah seorang ibu yang harus melakukan pekerjaan perang di luar rumah, tetapi masih terikat dengan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Jepang membutuhkan kerja ganda perempuan dengan meminta mereka untuk melakukan aktivitas domestik sekaligus publik untuk mendukung keberlangsungan rezim.

Watak fasis Jepang menihilkan napas kebebasan sipil. Aktivitas perempuan diarahkan untuk menyelesaikan dampak buruk penjajahan, tetapi tanpa hak untuk mengajukan suatu persoalan yang sebenar-benarnya menjadi kepentingan perempuan itu sendiri. Meskipun demikian, reaksi perempuan Indonesia dalam menghadapi tekanan penguasa Jepang sama sekali tidak bersifat pasif. Sebaliknya, terdapat tanda-tanda perlawanan terhadap upaya pendomestikasiannya dalam kehidupan politik. Strategi yang ditempuh oleh perempuan adalah dengan memanfaatkan narasi kebutuhan tenaga perempuan sebagai jalan untuk memperteguh posisinya dalam masyarakat. Perempuan memaknai tugas garis belakang bukanlah sebagai penguatan pertahanan agar mesin perang Jepang tetap berjalan, melainkan untuk memberi daya hidup yang membantu bangsanya keluar dari kesulitan serta sebagai upaya ke arah kemerdekaan yang diyakini akan datang.

Referensi

Terbitan Resmi Pemerintah

Kan po – Berita Pemerintah (Jakarta: Gunseikanbu, 2602-2605, 1942-1945).

Surat Kabar dan Majalah

“Penghargaan dan Nasehat Perdana Menteri Tojo kepada Kaum Wanita Pekerja Nippon”. *Pandji Poestaka*, 15 Juni 1944.

“Papaya dan Arti Kaum Wanita dalam Peperangan”. *Pandji Poestaka*, 16 Juni 1944.

“Dizaman Baroe dilingkungan Keloearga”. *Pandji Poestaka*, 15 Februari 1944.

Soera Asia, 17 April 1944.

Mr. R. Samsuedin “Insjaflah Tentang 3A”. *Asia Raya*, 12 Mei 1942.

“Kaum Ibu Jangan Tinggal Diam”. *Asia Raya*, 17 Mei 1942.

Maria Ulfah Santoso “Kedudukan Wanita dalam Masa Baru”. *Asia Raya*, 19 Juni 1943.

“Dimanakah Tempat Perempuan?”. *Asia Raya*, 20 November 1943.

Nyi Sri Mangunsarkoro “Pengaroeh Ketegoehan Watak Iboe kepada Masjarakat”. *Asia Raya*, 15 Januari 1944.

“Mulailah dengan Rumah Tangga Sendiri”. *Asia Raya*, 16 Februari 1944.

Nyi Sri Mangunsarkoro “Kebesaran Perempuan”. *Asia Raya*, 1 April 1944.

- Ny. Soekaptinah Soenarjo Mangunpuspito. "Soempah Bakti Kaoem Wanita". *Asia Raya*, 29 Mei 1944.
- "Keputusan Permusyawaratan *Djawa Hokokai* Fujinkai seluruh Djawa dan Madura". *Asia Raya*, 3 Juni 1944.
- "Sikap Kaum Wanita di masa Perang: Rapat Umum di Taman Raden Saleh". *Asia Raya*, 17 September 1944.
- "Rapat Oemoem Poetra Bg. Wanita". *Pembangoen*, 17 Maret 1943.
- SK Trimurti "Wanita diwaktoe Perang". *Pembangoen*, 2 Desember 1943.
- Djawa baroe*, 1 Februari 1943.
- Maria Ulfah Santoso "Kewadajiban Kaoem Wanita dalam Masjarakat". *Djawa Baroe*, 1 April 1943.
- "Kaum Wanita Nippon". *Djawa Baroe*, 15 April 1943.
- "Hidup Sederhana". *Sinar Baroe*, 1 Januari 1944.
- "Gadis Indonesia yang Ingin Mengabdikan Tanah Air". *Sinar Baroe*, 5 Februari 1944.
- "Perayaan Satu tahun Semarang Syu Fujinkai". *Sinar Baroe*, 12 Februari 1944.
- "Kewajiban Iboe". *Sinar Matahari*, 22 Oktober 1942.

Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Aziz, M.A. (1955). *Japan's Colonialism and Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Benda, Harry J. (1985). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Blackburn, Susan (2007). *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Yayasan Obor Indonesia/ KITLV.
- Ebenstein, William (2006). *Isme-isme yang Mengguncang Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Fatimah, Siti (2020). *Perempuan dan Politik: Perempuan Indonesia pada Masa Jepang*. Yogyakarta: Ombak.
- Goto, Ken'ichi (1998). *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardi, Lasmidjah (1981). *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran buku I- V*. Jakarta: Yayasan Wanita Pejoang.
- Horton, William Bradley & Didi Kwartanda (eds) (2009). *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*. Brill.
- Issom, Sri Samsiar (2000). *Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito Sosok Wanita Pergerakan Indonesia 1928-1956*. Tesis. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Kahin, George Mc Turnan (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Kurasawa, Aiko (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Goodman, Grant K. (1991). *Japanese Cultural Policies in Southeast Asia during World War 2*. New York: St.Martin's Press.
- Kratoska, Paul H., (ed) (1998). *Food Supplies and the Japanese Occupation in South-East Asia*. New York: ST. Martin's Press.
- Lone, Steward, (ed) (2007). *Daily Lives of Civilians in Wartime Asia: From the Taiping Rebellion to the Vietnam War*. London: Greenwoodpress.
- Lucas, Anton, (ed) (2012). *Radikalisme Lokal: Oposisi dan Perlawanan Terhadap Pendudukan Jepang Di Jawa 1942-1945*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.

- Notosisanto, Nugroho, dkk. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rambe, Hanna (1983). *Mencari Makna Hidupku Bunga Rampai Perjalanan Sujatin Kartowijono*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sato, Shigeru (2015). *War, Nationalism, and Peasants: Java Under Japanese Occupation 1942-1945*. New York: Routledge.
- Sato, Shigeru (2006). "Indonesia 1939-1942: Prelude to the Japanese occupation," *Journal of Southeast Asian Studies* 37, 2: 225-248.
- Sihombing, O.D.P. (1962). *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Jepang*. Jakarta: Sinar Jaya.
- Suryochondro, Sukanti (1984). *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Tim Penulis (1984). *Perjuangan Wanita 10 Windu setelah Kartini 1901-1984*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- Wertheim, W.F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.